

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

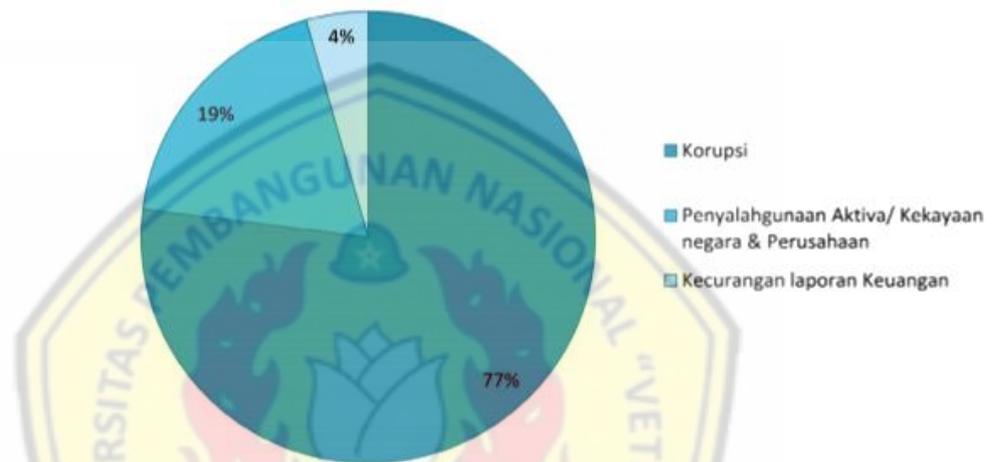
Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) semakin sering muncul dan menjadi sorotan. Hal ini terjadi karena banyak kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan di seluruh dunia, sehingga membuat diskusi mengenai GCG menjadi lebih sering dibicarakan. GCG bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif, mengendalikan tindakan karyawan, mendukung pencapaian tujuan bisnis serta mitigasi risiko dengan baik, sehingga dalam jangka panjang GCG diharapkan mampu meningkatkan reputasi perusahaan, dan memberi manfaat serta nilai tambah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan dari *stakeholder*. *Stakeholder* dalam suatu entitas memiliki keterbatasan informasi dibandingkan dengan manajemen yang masuk dan mengatur secara langsung kegiatan usaha suatu entitas, sedangkan informasi utama yang *stakeholder* butuhkan untuk mengambil sebagian besar keputusan ekonomi, berasal dari laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Sehingga penyusunan laporan keuangan harus akurat, andal, sesuai dengan standar, tepat waktu, dan menerapkan pengendalian internal, agar informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi dasar yang kuat serta dapat dipercaya bagi *stakeholder* ketika membuat keputusan.

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu upaya yang dirancang oleh organisasi untuk mencapai suatu tujuan, seperti melindungi aset perusahaan dan hak para *stakeholder* (keuanganlsm.com). Sehingga diharapkan dengan penerapan pengendalian internal, hal-hal yang merugikan perusahaan dapat diminimalisir. Namun, ternyata penerapan pengendalian internal masih dinilai belum efektif, karena masih terjadi banyak kasus kecurangan atau yang dikenal dengan sebutan *fraud* dalam perusahaan yang telah menerapkan pengendalian internal.

Berdasarkan artikel yang dikutip dari akuntansipedia.com menyatakan bahwa *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dalam *Report to the*

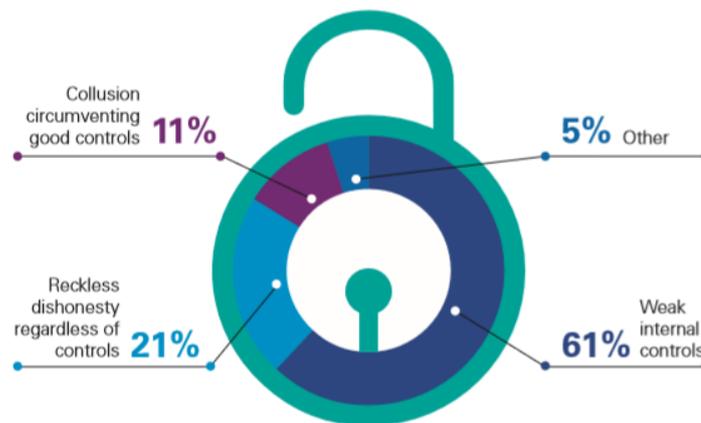
Nations on Occupational Fraud and Abuse melaporkan bahwa kasus *fraud* dan penyalahgunaan yang terjadi pada 2016 mencapai angka 2.410 *fraud* di tempat kerja yang terjadi pada 114 negara di seluruh Dunia. Ernest & Young (EY) yang merupakan salah satu kantor akuntan publik (KAP) *big four* dan ACFE pada tahun 2016 melakukan survei mengenai *fraud* dan menemukan fakta bahwa *fraud* yang paling sering terjadi di Indonesia adalah korupsi, dengan persentase sebesar 77%, namun *fraud* yang paling merugikan di Indonesia merupakan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan.



Sumber : Survey Fraud Indonesia 2016 (EY & ACFE)

Gambar 1. Kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia

Klynveld Peat Marwick Goerdeler atau yang dikenal dengan sebutan KPMG yang merupakan salah satu KAP terbesar di dunia juga mempublikasikan hasil risetnya pada Mei 2016 dan memberikan pernyataan bahwa lemahnya pengendalian internal merupakan masalah besar dan terus berkembang. Riset ini memberikan hasil bahwa 61% faktor yang berkontribusi dalam memfasilitasi *fraud* adalah lemahnya pengendalian internal. Pengendalian internal dikatakan lemah, ketika pengendalian tersebut dirancang dengan buruk dan tidak diikuti oleh karyawan.



Sumber: KPMG Global Profile of Fraudster

Gambar 2. Faktor yang berkontribusi terhadap *fraud*

Kasus *fraud* telah terjadi sejak lama dan masih terjadi hingga saat ini, sehingga kongres di Amerika Serikat telah menetapkan undang-undang keuangan yang disebut *Sarbanes-Oxley Act (SOX)*, dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional dan memperkuat pengawasan antar perusahaan. Salah satu prinsip fundamental dari SOX adalah sebuah sistem pengendalian internal yang kuat dan memadai harus ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan *fraud*. *Section 404(a)* dari Sarbanes-Oxley juga mengharuskan manajemen perusahaan publik untuk mengeluarkan laporan pengendalian internal yang mencakup pernyataan bahwa manajemen bertanggungjawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai dan penilaian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun fiskal perusahaan (Arens, *et al*, 2015, hlm.342).

Sistem pengendalian internal dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi. Perusahaan membutuhkan kumpulan dari pengendalian internal yang berhubungan, terintegrasi, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, tujuannya agar segala informasi yang diperoleh dari perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, serta mampu memberikan keyakinan akan tercapainya tujuan

perusahaan. Apabila suatu perusahaan atau organisasi tidak memiliki sistem pengendalian internal yang baik, maka hal tersebut akan menjadi faktor pendorong masalah penggelapan dan berbagai penyimpangan lain di dalam suatu organisasi atau perusahaan (Wakhyudi, 2018, hlm.12). Basri (2018) berpendapat bahwa sistem pengendalian internal juga dapat digunakan untuk melacak kesalahan yang terjadi agar dapat dikoreksi. Sehingga sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan oleh setiap entitas, baik yang usahanya berskala besar maupun berskala kecil.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga disebut dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan dapat berdiri tegak pada saat krisis global melanda dunia, serta peran UMKM begitu besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya kontribusi terhadap produk domestik bruto. Menurut berita yang dikutip dari valid.co, UMKM mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa kontribusi di sektor UMKM meningkat mulai dari 57,84% menjadi 60,34%. Tenaga kerja yang diserap UMKM juga tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22% dalam kurun waktu yang sama.

Namun, masih banyak UMKM yang belum menerapkan sistem pengendalian internal, padahal UMKM sangat rentan terhadap *fraud*. akuntansipedia.com menyebutkan kerugian rata-rata yang diderita usaha kecil dengan karyawan kurang dari 100 orang mencapai \$200.000. Jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata kerugian dari kategori lain. Penelitian ACFE juga menyatakan bahwa sabotase pemeriksaan dan penagihan *fraud* adalah sebagian besar dari skema penipuan umum pada usaha kecil. Pra riset dilakukan ke PT ABC guna mengkonfirmasi fenomena ini, dari pra riset didapat informasi dari pernyataan informan kunci mengenai kasus penggelapan kas yang pernah terjadi di PT ABC sebagai berikut

Iya, dulu disini pernah kejadian ada karyawan yang melakukan penggelapan uang. Tapi langsung ketahuan sama bos sampe mereka dipecat. Saya kurang tau detailnya gimana. Karena kasus itu terjadi udah lumayan lama, jadi saya gak tau persis. Waktu itu diceritain dari orang-orang yang ada disini, kejadian sekitar 2016 (Manuskrip: SI.1 Wawancara 1 Oktober, 2018).

Penggelapan kas terjadi karena sifat kas yang sangat *liquid* atau sangat mudah dicairkan, bersifat ringan, dan sulit untuk dilacak keberadaannya apabila telah digelapkan. Bentuk penggelapan terhadap kas dapat dilakukan dalam proses penerimaan dan pengeluaran kas atau yang disebut dengan istilah arus kas. Arus kas yang pengelolaannya tidak benar akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara arus kas yang masuk dan arus kas keluar. Kas perusahaan yang terlalu kecil akan mengakibatkan perusahaan kekurangan dana dan menyebabkan terganggunya aktivitas operasional maupun pengembangan usaha, serta perusahaan tidak memiliki cadangan kas untuk biaya tak terduga. Namun, jika perusahaan memiliki jumlah kas yang terlalu besar, maka perusahaan akan kelebihan dana dan menyebabkan adanya pemborosan sehingga dapat merugikan perusahaan (Kaunang, 2013).

PT ABC belum membuat laporan arus kas setiap bulan, karena PT ABC membuat laporan arus kas ketika akhir tahun guna keperluan audit, hal ini ditemukan dari wawancara prariset

Kita bikin laporan arus kas kalo mau di audit aja, kalo hari-hari biasa, kita cuma nyatet di buku kas bulanan. Kita juga belum bisa mastiin kas fisik yang ada di akhir tahun sama kas yang ada di laporan arus kas itu jumlahnya beneran sama atau enggak, kita buat laporan arus kas itu karena disyaratkan sama SAK ETAP (Manuskrip: SI.1 Wawancara 1 Oktober, 2018).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT ABC membuka potensi terjadinya *fraud* dalam arus kasnya, karena PT ABC belum mampu memastikan jumlah kas yang ada dicatat dengan kas yang ada di tangan, sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesalahan informasi. Kesalahan informasi itu dapat dijadikan kesempatan oleh para pelaku kecurangan guna melancarkan aksinya. Sehingga *fraud* tidak dapat dideteksi karena PT ABC gagal melihat indikasi *fraud* tersebut.

Bentuk *fraud* pada penerimaan dan pengeluaran kas antara lain pengambilan kas dari kas kecil untuk kepentingan pribadi, pemalsuan cek, membukukan cek yang ditolak bank, penggunaan dokumen palsu, pembelian fiktif dari *supplier* fiktif, menyembunyikan retur dan diskon, serta manipulasi data gaji karyawan. Salah satu bentuk kecurangan kas juga pernah terjadi di PT ABC, *fraud* tersebut

terjadi dalam proses pengeluaran kas. Proses terjadinya *fraud* dijelaskan oleh informan sebagai berikut

Karena kalo yang sebelumnya itu, dalam pengadaan uang mintanya ke direktur, dia langsung angka gelondongan. Misalkan untuk 1 bulan kita butuh 35jt, dia cuma nulis permintaan kas 35jt. Sedangkan menurut logika seharusnya dirinci, apa aja yang dibutuhkan selama satu bulan itu (Manuskrip: SI.1 Wawancara 1 Oktober, 2018).

PT ABC membiarkan uang keluar tanpa meminta rincian uang tersebut akan digunakan untuk apa, sehingga tidak ada kontrol atas pengeluaran kas dan *fraud* terjadi di PT ABC yang menyebabkan kerugian sekitar 25 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal atas kas menjadi syarat mutlak terhadap keamanan dan perlindungan kas, namun sistem pengendalian internal tidak dirancang untuk mendeteksi kesalahan, tetapi hanya untuk mengurangi dan mencegah adanya penyalahgunaan kas. Pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas harus memiliki standar/aturan yang memadai sebagai acuan dalam pelaksanaan aktivitas pengendalian. Namun, masih belum ada aturan pasti mengenai pengendalian internal untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Pengendalian internal lebih ditekankan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan pengendalian internal untuk bank umum, lembaga asuransi, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga publik lainnya, tetapi tidak ada aturan yang dibuat khusus untuk UMKM. Pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 hanya untuk lembaga pemerintahan, sehingga UMKM belum memiliki pedoman resmi mengenai pengendalian internal yang seharusnya mereka terapkan, padahal *stakeholder* tetap membutuhkan laporan mengenai pengendalian internal dari UMKM tersebut. Mereka membutuhkan laporan yang menyatakan keefektifan pengendalian internal untuk menghindari asimetri informasi. Sehingga kebanyakan dari entitas tanpa akuntabilitas publik menggunakan lima (5) komponen pengendalian internal COSO sebagai standar pengendalian internal dan dasar penyusunan standar operasional perusahaan, karena belum terdapat aturan baku dari pemerintah maupun pihak terkait mengenai pengendalian internal pada entitas tanpa akuntabilitas publik.

Salah satu auditor dari KAP EY juga menyetujui hal tersebut lewat pernyataannya yaitu

Kalo misalkan mau lihat SPInya bagus/enggak, pake COSO, yang 5 item itu, ada pembagian tugas, pengawasan, kita masih pake itu. Gimana liat bagusnya SPI itu dari dia punya prosedur kerja/engga. Contoh kita *audit purchase*, kita liat *flowchart* dari kita nerbitin penawaran sampe kita dapet barang, itu gimana *flowchart* nya, kita bisa *split* disitu (Manuskrip: SI.2 Wawancara 14 Oktober, 2018).

Salah satu informan kunci dari PT ABC juga menyatakan bahwa mereka melakukan pengendalian internal berdasarkan SOP perusahaan yang apabila dilihat dari sisi proses, maka pengendalian internal tersebut menggunakan COSO, pernyataan tersebut dikutip sebagai berikut

Pengendalian internal yang diterapkan di kantor kita ngikutin SOP dan aturan yang berlaku umum, karena emang dalam nyusun SOP kita ikutin COSO/aturan SPI yang berlaku secara umum. Contoh, dokumen harus lengkap, mesti ditandatangani dulu sama yang bertanggungjawab. Kayak gitu. Terus untuk kegiatan sehari-hari itu ada pengawasan (Manuskrip: KI.1 Wawancara 23 Oktober, 2018).

Kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan auditor eksternal dan informan kunci dari PT ABC adalah belum terdapat aturan baku yang mengatur tentang pengendalian internal pada UMKM, dan COSO merupakan standar yang masih relevan untuk saat ini, bukan hanya untuk UMKM namun COSO juga dijadikan sebagai standar acuan dalam pembuatan peraturan pengendalian internal bagi perusahaan besar yang telah *go public* maupun yang belum, serta instansi pemerintahan.

PT ABC merupakan perusahaan privat yang menyediakan pelayanan jasa konsultasi, pemborongan pekerjaan non konstruksi, jasa training, studi simulasi *reservoir* minyak dan gas bumi, *digitizing*, pemetaan geologi, *seismic* dan interpretasinya, pengadaan *software* CMG, serta implementasi teknologi informasi. PT ABC membutuhkan sistem pengendalian internal karena (1) PT ABC memiliki tanggungjawab kepada *stakeholder* seperti pemegang saham, kreditur, dan pemerintah, (2) tujuan yang ditetapkan PT ABC akan dapat dicapai, dan meminimalisir hambatan yang terjadi di perusahaan, (3) informasi keuangan maupun non keuangan yang dihasilkan PT ABC menjadi lebih valid dan kredibel

sehingga dapat digunakan oleh *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan, dan (4) PT ABC mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

Namun, beberapa kegiatan yang kurang sesuai dengan 5 komponen pengendalian COSO telah ditemukan saat pra riset pada PT ABC, seperti tidak adanya kontrol secara berkala dari dewan komisaris, struktur organisasi di PT ABC yang masih sangat sederhana, hingga pembagian tugas yang masih tumpang tindih. Sebagai contoh, bagian akuntansi mendapatkan akses langsung dari bagian kasir untuk menjalankan fungsi sebagai kasir, padahal ini bertentangan dengan praktek pengendalian internal yang sehat, yaitu fungsi penyimpanan kas (*cashier*) harus terpisah dari fungsi akuntansi (Shatu, 2016, hlm.43).

Penelitian terdahulu yang relevan masih menunjukkan banyaknya perbedaan mengenai analisis sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada UMKM. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bahar dan Ginting (2018), tentang Evaluasi Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Pelaku UMKM di Kota Batam, dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan sampel penelitian ini diambil menggunakan pendekatan *probability sampling*. Hasil penelitian bahwa pengendalian internal dalam pengelolaan sistem penambahan dan pengurangan kas pada UMKM Kota Batam mengindikasikan bahwa elemen-elemen pada pengendalian internal yang dilakukan oleh para pemilik UMKM Cukup efektif akan tetapi ada beberapa aspek kelemahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Oseifuah dan Gyekye (2013), mengenai *Internal Control in Small and Microenterprises in The Vhembe District, Limpopo Province, South Africa* yang menggunakan metode kuantitatif, menunjukkan hasil bahwa: (i) bahwa praktik pengendalian internal di kalangan bisnis kecil perusahaan sektor di Distrik Vhembe rendah, dengan hanya 45% dari perusahaan yang disurvei memiliki sistem kontrol internal yang memadai; (ii) bahwa ukuran bisnis di sektor ini belajar menentukan kepemilikan asuransi penutup. Manurung dan Rahayu (2016), juga melakukan penelitian Pengendalian Internal atas Kas dan *Traceability*: Studi Kasus Empat UMKM di Bandung, dengan menggunakan metode *analytical hierachycal process* (AHP), yang disertai dengan kuesioner beberapa interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat

perusahaan yang diteliti PT MGJ mempunyai pengendalian internal yang paling memadai yaitu sebesar 97%, PT MDI sebesar 91% dan PT SSM sebesar 89%. PT PSJ memiliki pengendalian internal yang belum memadai yaitu sebesar 29%.

Sebagian besar dari penelitian terdahulu masih menggunakan metode kuantitatif yang memiliki wilayah luas, serta tingkat variasi yang kompleks dan dinilai masih kurang mendalam dibandingkan dengan metode kualitatif, sehingga peneliti menentukan untuk menggunakan pendekatan kualitatif, agar deskripsi dan interpretasi penelitian ini dapat diteliti secara lebih mendalam, dan peneliti dapat memfokuskan pada satu situs penelitian. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT ABC Jakarta”**

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga dalam meneliti terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti fokus penelitian. Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan terfokus untuk memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian (Sugiyono, 2016, hlm.32).

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas di PT ABC. Peneliti juga akan mengamati dan menganalisa, apakah penerapan sistem pengendalian internal pada penerimaan dan pengeluaran kas yang selama ini diterapkan di PT ABC telah sesuai dengan 5 Komponen Pengendalian Internal COSO. Kas dipilih karena kas merupakan aset perusahaan yang paling *liquid* dan sangat mudah digelapkan. Kas yang akan diteliti adalah seluruh kas yang ada di PT ABC, baik *cash on hand* maupun *cash in Bank*.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Etnometodologi. Pendekatan ini dinilai sangat sesuai karena peneliti menggunakan metode untuk melihat bagaimana individu memaknai dan melaksanakan kegiatan sehari-harinya, serta menganalisa kepercayaan dan perilaku umum sebagai unsur pokok dari sebuah perilaku yang diatur secara sosial.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan pada penerimaan dan pengeluaran kas PT ABC?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal yang diterapkan pada penerimaan dan pengeluaran Kas PT ABC telah sesuai dengan 5 komponen sistem pengendalian internal menurut COSO.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Bagi penulis penelitian ini sebagai pengimplementasian ilmu yang didapat di perkuliahan serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Sedangkan bagi pembaca penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan, pembelajaran, wawasan baru dibidang akuntansi tentang sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk dikembangkan, sehingga menghasilkan *output* yang lebih baik.

b. Manfaat Praktis

Bagi badan usaha yaitu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pelaku UMKM dalam bentuk pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal guna melindungi penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di UMKM, memperbaiki sistem pengendalian internal yang masih belum efektif agar menjadi pelindung dari kecurangan yang berpeluang terjadi di dalam UMKM itu sendiri, mempermudah para pelaku UMKM untuk

meningkatkan pengendalian internal di masing-masing usahanya, sehingga UMKM tidak mengalami kerugian usaha yang diakibatkan oleh tindak kecurangan. Tujuan utamanya adalah agar UMKM yang sedang berkembang mampu tumbuh menjadi lebih besar.

